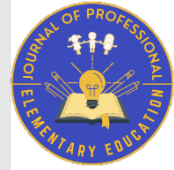




Journal of Professional Elementary Education JPEE

Vol. 5, No. 1, Maret 2026 hal. 1-120

Journal Page is available to <http://jpee.lppmbinabangsa.id/index.php/home>



PERAN SERTA PEMERINTAH DALAM PENGADAAN DANA DAN PEMBERIAN DUKUNGAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR DI INDONESIA

Destia Nur Khasanah¹, Sri Marmoah²,

^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret

Email: destianur16@student.uns.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the role of the government in funding as well as the forms of support in improving the quality of primary education in Indonesia using a qualitative approach with the Systematic Literature Review (SLR) method, based on articles from Google Scholar and SINTA from 2018–2026. The results of the study show that the government plays a primary role in funding through the BOS program as the main source of school financing, as well as policy support, digitalization, and infrastructure. The 6M analysis reveals that the effectiveness of policies is still hindered by limitations in human resource competence (Man), uneven digitalization (Machine), gaps in facilities (Material), weak regulation implementation (Method), disparities in fund distribution (Money), and geographical and social factors (Measurement). Therefore, optimizing the role of the government requires strengthening governance, increasing transparency, and sustainable utilization of technology to support effectiveness.

Keywords: *The Role of Government, Education Funding, BOS, Elementary School, SLR*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam pengadaan dana serta bentuk dukungan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) pendekatan kualitatif, berdasarkan artikel dari Google Scholar dan SINTA tahun 2018–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berperan utama dalam pendanaan melalui program BOS sebagai sumber utama pembiayaan sekolah, serta dukungan kebijakan, digitalisasi, dan sarana prasarana. Analisis 6M mengungkap bahwa efektivitas kebijakan masih terhambat oleh keterbatasan kompetensi SDM (*Man*), belum meratanya digitalisasi (*Machine*), kesenjangan fasilitas (*Material*), lemahnya implementasi regulasi (*Method*), ketimpangan distribusi dana (*Money*), serta faktor geografis dan sosial (*Measurement*). Oleh karena itu, optimalisasi peran pemerintah memerlukan penguatan tata kelola, peningkatan transparansi, serta pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan guna mendukung efektivitas.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pendanaan Pendidikan, BOS, Sekolah Dasar, SLR

PENDAHULUAN

Peran pemerintah dalam pendanaan dan dukungan pendidikan dasar di Indonesia merupakan faktor kunci dalam menjamin keberlangsungan dan kualitas pendidikan. Studi menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab utama untuk menyediakan sumber pendanaan yang memadai melalui kebijakan anggaran pendidikan. Salah satu alat utama pemerintah untuk mendukung operasional sekolah dasar, seperti pembiayaan kegiatan pembelajaran, pengadaan sarana prasarana, dan kebutuhan administrasi sekolah, adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Maliki, 2020). Sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran adalah dua kendala besar yang terus menghambat penyebaran pendidikan yang merata, terutama di daerah terpencil (Supianto et al., 2023). Selain itu, kebijakan yang menetapkan alokasi minimal 20% anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendukung sektor pendidikan secara berkelanjutan (Rizky & Suharyati, 2025).

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pendanaan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, yang dapat diidentifikasi melalui pendekatan Analisis 6M, yaitu manusia (sumber daya manusia), mesin (teknologi), material (sarana prasarana), metode (metode/kebijakan), uang (pendanaan), dan pengukuran/lingkungan. Metode ini memungkinkan identifikasi akar masalah secara sistematis dan menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang saling berkaitan.

Dari aspek Money, meskipun dana BOS telah meningkatkan akses pendidikan, masih terdapat ketimpangan dalam distribusi anggaran antar daerah, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal (Suwandi, 2026). Dari aspek Method, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan menjadi isu yang sering muncul, di mana kurangnya pengawasan dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan anggaran. Dari aspek Man, keterbatasan kompetensi pengelola keuangan sekolah turut menghambat optimalisasi penggunaan dana yang tersedia (Hutasoit & Sidabutar, 2026).

Di sisi lain, pemerintah juga memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pendidikan. Meskipun pemerintah menjadi aktor utama dalam pendanaan, berbagai studi menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat tetap diperlukan untuk menutup keterbatasan anggaran dan meningkatkan kualitas pendidikan (Rusitayanti & Anggreni, 2025). Pemerintah melalui regulasi seperti pembentukan komite sekolah dan kebijakan manajemen berbasis sekolah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta pengawasan penggunaan dana pendidikan (Majiid et al., 2025).

Dari aspek Machine dan teknologi, hasil kajian menunjukkan bahwa inovasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pendanaan pendidikan terus berkembang, salah satunya melalui digitalisasi sistem keuangan seperti penggunaan aplikasi e-RKAS. Digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan (Cahyani & Ali, 2026). Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala dari aspek Man, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi di beberapa daerah (Trimiltin & Ahmad, 2025).

Berdasarkan sintesis dari berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pendanaan dan dukungan pendidikan dasar di Indonesia sangat dominan, namun belum sepenuhnya optimal. Permasalahan seperti ketimpangan distribusi dana, rendahnya transparansi, serta keterbatasan implementasi kebijakan menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui pendekatan 6M yang terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas tata kelola keuangan pendidikan, penguatan kebijakan berbasis data, serta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat guna mencapai sistem pendidikan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai hasil penelitian terdahulu terkait peran pemerintah dalam pengadaan dana dan pemberian dukungan pendidikan pada sekolah dasar di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, sistematis, dan berbasis data sekunder melalui sintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan. Data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, prosiding, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan pendidikan yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada berbagai basis data ilmiah terpercaya, seperti Google Scholar, SINTA, dan portal jurnal nasional terindeks lainnya, dengan menggunakan kata kunci seperti "peran pemerintah dalam pendidikan", "pendanaan pendidikan dasar", "dana BOS", dan "dukungan pemerintah terhadap sekolah dasar". Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi artikel yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2018-2026, memiliki fokus pada pendidikan dasar di Indonesia, membahas peran pemerintah dalam pendanaan atau dukungan pendidikan, serta tersedia dalam bentuk full text (akses terbuka). Sementara itu, artikel yang tidak relevan dengan topik, tidak memiliki kejelasan metodologi, atau tidak dapat diakses secara lengkap dikeluarkan dari proses analisis.

Tahapan analisis data dilakukan secara sistematis melalui beberapa langkah, yaitu identifikasi literatur, seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, evaluasi kualitas sumber, serta sintesis hasil penelitian. Data yang telah terpilih kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menginterpretasikan berbagai temuan secara mendalam, khususnya terkait bentuk peran pemerintah dalam pendanaan pendidikan, kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penyediaan sarana dan prasarana, serta dukungan regulasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis 6M untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan permasalahan secara sistematis. Analisis 6M merupakan kerangka yang membagi faktor-faktor penyebab masalah ke dalam enam dimensi utama, yaitu: (1) Man, sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan; (2) Machine, teknologi dan perangkat yang digunakan dalam sistem keuangan dan administrasi pendidikan; (3) Material, sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia; (4) Method, kebijakan, prosedur, dan sistem pengelolaan pendidikan; (5) Money, aspek pendanaan dan pembiayaan pendidikan; dan (6)

Measurement, kondisi lingkungan dan faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Kerangka 6M ini memungkinkan analisis yang lebih terstruktur, komprehensif, dan multidimensional terhadap permasalahan pendidikan dasar di Indonesia.

Dengan mengkombinasikan metode Systematic Literature Review dan Analisis 6M, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang komprehensif dan analitis dalam mengidentifikasi permasalahan serta memberikan rekomendasi strategis. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peran pemerintah dalam pengadaan dana dan dukungan pendidikan dasar di Indonesia, serta menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil seleksi literatur dengan metode PRISMA terhadap 17 artikel yang relevan, Analisis 6M menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengadaan dana dan dukungan pendidikan dasar di Indonesia masih belum optimal karena dipengaruhi oleh faktor yang saling berkaitan. Dari dimensi Money, program BOS menjadi sumber utama pembiayaan namun masih terjadi ketimpangan distribusi; dari dimensi Method, regulasi telah tersedia tetapi lemah dalam implementasi dan pengawasan; dari dimensi Man, kompetensi pengelola keuangan sekolah masih terbatas; dari dimensi Material, terdapat kesenjangan sarana prasarana antar wilayah; dari dimensi Machine, digitalisasi keuangan meningkatkan transparansi namun belum merata; serta dari dimensi Measurement, kondisi geografis dan rendahnya partisipasi masyarakat turut menghambat efektivitas kebijakan.

Tabel 1.1 analisis studi literatur review

No.	Judul Artikel	Temuan	Sumber
1.	Implementasi Manajemen Inovasi dan Kreatifitas Guru dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran	Alokasi 20% APBN/APBD menunjukkan komitmen pemerintah, namun implementasi belum merata	Supriadi (2018)
2.	Implementasi Kebijakan Dana BOS Permendikbudristek No.63 Tahun 2023 untuk Peningkatan Mutu Pendidikan	Regulasi BOS terbaru meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas penggunaan dana	Hikma et al. (2025)
3.	Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar	Pengelolaan BOS berjalan sesuai prosedur, namun masih bergantung pada kapasitas sekolah	Anwar et al. (2026)

No.	Judul Artikel	Temuan	Sumber
4.	Analisis Manajemen Keuangan SDN Kandungan III Surabaya	Digitalisasi melalui ARKAS meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan sekolah	Sabrina (2023)
5.	Pengaruh Efektivitas, Akuntabilitas, Dan Transparansi Sekolah Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Efektivitas pengelolaan dana BOS sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan anggaran serta sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel	Pradana & Kristiyanti, (2025)
6.	Sumber-Sumber Dana Pendidikan	Pemerintah menjadi sumber utama pendanaan melalui BOS dan BOP sebagai tulang punggung operasional SD	Fiandi & Junaidi (2023)
7.	SUMBER DANA PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	Pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, namun pemerintah tetap aktor utama	Fitri et al. (2022)
8.	Analisis Sumber dan Jenis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia	Sistem pembiayaan pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbasis dana BOS	Nadhifa et al. (2024)
9.	PENGARUH ANGGARAN PENDIDIKAN, KUALITAS PENDIDIK DAN AKREDITASI SEKOLAH TERHADAP KUALITAS LULUSAN (STUDI KASUS SMA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2017-2019)	Anggaran pemerintah mendukung pembangunan, rehabilitasi, dan tunjangan pendidikan	Mahadi & Konadi (2020)
10.	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Era Digital dalam Meningkatkan	Digitalisasi keuangan sekolah meningkatkan efisiensi, bergantung pada literasi digital SDM	Najma et al., (2025)

No.	Judul Artikel	Temuan	Sumber
	Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 092/VII Pematang Kolim I Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun		
11.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI SIPLah DI SEKOLAH DASAR KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG	Sistem SIPLah mendukung transparansi pengadaan, namun terkendala literasi digital	Pamilia et al. (2022)
12.	Manajemen Keuangan: Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar	Kompetensi manajerial kepala sekolah menentukan efektivitas pengelolaan dana BOS	Pebriyanti & Aliyyah (2024)
13.	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Pengelolaan sarana prasarana yang baik meningkatkan kualitas layanan pendidikan	Safiinatunnajah et al. (2024)
14.	ANALISIS PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI KESEK 1	Keterbatasan fasilitas teknologi menghambat optimalisasi pembelajaran di sekolah dasar	Ninin et al. (2024)
15.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Daring di Masa Pandemi	Ketimpangan sarana prasarana masih terjadi terutama di daerah terpencil	Nasrudin & Maryadi (2021)

No.	Judul Artikel	Temuan	Sumber
16.	Studi Pengaruh Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Terhadap Peningkatan Infrastruktur Pendidikan	Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta kondisi geografis menjadi faktor utama yang menghambat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil	Makatara (2025)
17.	Evaluasi Kebijakan Pendidikan terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar	Pemerintah perlu memperkuat DAK untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan di daerah 3T	Somantri et al. (2024)

Berdasarkan hasil analisis studi literatur menggunakan pendekatan 6M, diperoleh berbagai temuan yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran pemerintah dalam pendanaan pendidikan dasar di Indonesia.

Man (Sumber Daya Manusia)

Dari aspek sumber daya manusia (Man), kompetensi manajerial kepala sekolah dan pengelola keuangan menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pengelolaan dana BOS, sehingga peningkatan kapasitas SDM menjadi kebutuhan yang mendesak. Kepala sekolah yang memiliki kompetensi manajerial yang baik terbukti mampu mengoptimalkan penggunaan dana BOS secara efektif dan akuntabel. Sebaliknya, keterbatasan pemahaman terhadap regulasi dan mekanisme pelaporan keuangan mengakibatkan potensi penyimpangan dan inefisiensi penggunaan anggaran.

Digitalisasi keuangan sekolah meningkatkan efisiensi, bergantung pada literasi digital SDM (Najma et al., 2025). Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan SDM sekolah turut menjadi hambatan dalam mengadopsi sistem teknologi keuangan yang dikembangkan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan pengembangan profesional berkelanjutan merupakan investasi penting yang harus diprioritaskan oleh pemerintah dalam rangka mengoptimalkan efektivitas pengelolaan dana pendidikan.

Machine (Teknologi)

Dari dimensi Machine, pemerintah telah mengembangkan berbagai sistem digital untuk mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan dana pendidikan. Digitalisasi melalui ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) telah terbukti meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan sekolah secara signifikan (Sabrina, 2023). Demikian pula, platform SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah) dirancang untuk mendukung transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan sekolah, meskipun implementasinya masih terkendala oleh rendahnya literasi digital pengguna (Pamilia et al., 2022).

Meskipun demikian, digitalisasi keuangan sekolah secara keseluruhan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Tantangan utama dalam dimensi ini adalah belum meratanya akses terhadap infrastruktur teknologi dan keterbatasan kemampuan SDM dalam memanfaatkan teknologi secara optimal, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital.

Material (Sarana dan Prasarana)

Pada aspek sarana dan prasarana (Material), dukungan pemerintah dalam penyediaan fasilitas pendidikan terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan (Safiinattunnajah et al., 2024). Kompetensi manajerial kepala sekolah menentukan efektivitas pengelolaan dana BOS (Pebriyanti & Aliyyah, 2024). Pengelolaan sarana prasarana yang terencana dan sistematis menjadi prasyarat penting bagi terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan berkualitas.

Namun demikian, masih terdapat keterbatasan fasilitas yang signifikan, di mana keterbatasan fasilitas teknologi di banyak sekolah dasar terbukti menghambat optimalisasi pembelajaran (Ninin et al., 2024). Lebih jauh, ketimpangan infrastruktur pendidikan masih menjadi permasalahan serius terutama di daerah terpencil, di mana akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai masih sangat terbatas (Nasrudin & Maryadi, 2021). Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan afirmatif yang lebih kuat dan terukur dalam penyediaan sarana prasarana pendidikan, terutama untuk menjamin pemerataan akses di seluruh wilayah Indonesia.

Method (Metode dan Kebijakan)

Dari dimensi Method, pemerintah telah menunjukkan komitmen melalui kebijakan alokasi anggaran 20% dari APBN/APBD untuk sektor pendidikan, meskipun implementasinya di lapangan belum sepenuhnya merata (Supriadi, 2018). Regulasi terbaru terkait pengelolaan dana BOS yang lebih fleksibel dan akuntabel melalui Permendikbud Ristek No. 63 Tahun 2023 merupakan langkah maju yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana pendidikan (Hikma et al. (2025).

Pengelolaan BOS berjalan sesuai prosedur, namun masih bergantung pada kapasitas sekolah (Anwar et al., 2026). Efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan dan pengawasan berbasis data (Pradana & Kristiyani, 2025), sehingga penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi elemen kritis yang perlu terus ditingkatkan. Pelaksanaan di lapangan masih bergantung pada kapasitas masing-masing sekolah serta menghadapi dinamika kebutuhan yang beragam, yang menuntut fleksibilitas dan adaptabilitas kebijakan secara berkelanjutan.

Money (Pendanaan)

Dari aspek pendanaan (Money), pemerintah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah menetapkan standar pembiayaan minimum yang menjadi tulang punggung operasional sekolah dasar di seluruh Indonesia. BOS bersama Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) merupakan sumber utama pendanaan yang mendukung keberlangsungan operasional sekolah dasar secara nasional (Fiandi & Junaidi, 2023). Selain itu, anggaran pemerintah juga mencakup dukungan untuk pembangunan gedung, rehabilitasi fasilitas, dan tunjangan

pendidikan yang berkontribusi terhadap pengembangan infrastruktur sekolah (Mahadi & Konadi, 2020).

Pembiayaan pendidikan dirancang dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang menunjukkan adanya sistem pengelolaan yang terstruktur dan terukur (Nadhifa et al., 2024). Namun, efektivitas pendanaan masih dipengaruhi oleh keterbatasan distribusi yang belum merata dan perlunya tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memastikan ketercukupan dan optimalisasi penggunaan dana pendidikan (Fitri et al., 2022).

Measurement (Lingkungan)

Dari aspek lingkungan dan pengukuran (Measurement/Environment), faktor eksternal seperti keterbatasan anggaran daerah, kondisi geografis yang beragam, serta rendahnya kualitas SDM di beberapa wilayah turut mempengaruhi pemerataan akses dan kualitas pendidikan (Makatara, 2025). Kondisi ini menciptakan disparitas yang signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah dengan kondisi infrastruktur yang memadai dan yang tidak.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penguatan kebijakan afirmatif melalui peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) khususnya untuk wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) (Somantri et al., 2024). Pengukuran efektivitas kebijakan juga perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan konteks sosial, geografis, dan budaya masing-masing wilayah, sehingga kebijakan yang dirancang dapat benar-benar responsif terhadap kebutuhan dan kondisi lokal yang beragam.

Secara keseluruhan, hasil Analisis 6M ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pendanaan dan dukungan pendidikan dasar sudah cukup dominan, namun belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional yang saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terintegrasi melalui penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerataan sarana prasarana, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi agar efektivitas peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar dapat tercapai secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review (SLR) terhadap 17 artikel dengan pendekatan Analisis 6M, peran pemerintah dalam pendanaan dan dukungan pendidikan dasar di Indonesia tergolong dominan namun belum optimal. Pemerintah berperan sebagai penyedia utama dana melalui BOS dan APBN/APBD serta mendukung melalui kebijakan, digitalisasi, dan penyediaan sarana prasarana. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh berbagai faktor, yaitu keterbatasan kompetensi SDM (*Man*), rendahnya literasi digital (*Machine*), kesenjangan fasilitas (*Material*), lemahnya implementasi kebijakan (*Method*), ketimpangan distribusi dana (*Money*), serta faktor geografis dan sumber daya daerah (*Environment*). Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas SDM, pemerataan

fasilitas, serta optimalisasi teknologi secara terintegrasi guna mewujudkan sistem pendidikan dasar yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M., et al. (2026). Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Inpres Kiwangona. <https://journalcenter.org/index.php/jimak/article/download/5755/4402/23933>
- Ayusaputri, K. G., Musatafa, I. A., Syamsuddin, S., & Warman, W. (2024). Pengelolaan Sarana Dan Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan. *Jurnal Basicedu*, 8(6), 4766–4776. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i6.9082>
- Fiandi, A., & Junaidi, J. (2023). Sumber-Sumber Dana Pendidikan. *Jurnal Basicedu*, 6(6), 10414–10421. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i6.4391>
- Fitri, B., et al. (2022). Sumber Dana Pendidikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal/article/download/674/314/1640>
- Hikma, V. A., Abduloh, A., & Purnamaningsih, I. R. (2025). Implementasi Kebijakan Dana BOS Permendikbudristek No.63 Tahun 2023 untuk Peningkatan Mutu Pendidikan. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 10(3), 2171–2180. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v10i3.1992>
- Hutasoit, J. B., & Sidabutar, I. C. (2026). Manajemen keuangan sekolah. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jimp/article/view/1663>
- Mahadi, & Konadi, W. (2020). Pengaruh Anggaran Pendidikan, Kualitas Pendidik dan Akreditasi Sekolah terhadap Mutu Pendidikan. <https://jurnal.uniki.ac.id/index.php/idm/article/download/200/240/861>
- Majiid, M. A., et al. (2025). Manajemen keuangan pendidikan berbasis filantropi: SLR. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/semnas-ps/article/view/63650>
- Makataru, B. A. Y. (2025). Studi pengaruh pengelolaan administrasi keuangan daerah terhadap peningkatan infrastruktur pendidikan. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jimp/article/download/785/728>
- Maliki, B. I. (2020). Peranan dana BOS terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. <https://jurnal.alfithrah.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/66>
- Nadhifa, et al. (2024). Analisis jenis dan sumber pembiayaan pendidikan di Indonesia (SLR). <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/JUBPI/article/download/3004/2352>
- Najma, N., Indriyani, T., & Sodiah, S. (2025). Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Era Digital dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 092/VII Pematang Kolim I Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. *SOKO GURU: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(2), 379–393. <https://doi.org/10.55606/sokoguru.v5i2.5825>
- Nasrudin, & Maryadi. (2021). Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam pembelajaran di SD. <https://aulad.org/index.php/aulad/article/download/178/pdf/869>
- Ninin, et al. (2024). Analisis sarana dan prasarana di SD Negeri Kesek 1. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/1336/1166/3927>

- Pamilia, S. C., Muhammad, A. S., & Okparizan, O. (2022). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui SIPLah di Sekolah Dasar Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 20(1), 1–13. <https://doi.org/10.46730/jiana.v20i1.8014>
- Pebriyanti, D., & Aliyyah, R. R. (2024). Manajemen Keuangan: Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar. *Karimah Tauhid*, 3(3), 2716–2737. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12221>
- Pradana, M. D., & Kristiyanti, L. M. S. (2025). Pengaruh efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi sekolah terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi*. <https://www.jurnal.jiemap.net/index.php/jikab/article/download/124/81>
- Rizkya, R. T., & Suharyati, H. (2025). Kebijakan pendidikan di Indonesia: SLR. <https://doi.org/10.26877/jmp.v14i3.23835>
- Rusitayanti, N. W. A., & Anggreni, N. L. P. Y. (2025). Pembiayaan pendidikan di Indonesia: SLR. <https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/santimas/article/view/5612>
- Sabrina. (2023). Manajemen keuangan di sekolah dasar (digitalisasi ARKAS). <https://ejournal.jendelaedukasi.id/index.php/IJP/article/download/440/148>
- Somantri, D., Sembiring, D. A., & Septiani, I. A. (2023). Evaluasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana di sekolah dasar. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/9612>
- Supriadi, D. (2018). Implementasi manajemen inovasi dan kreatifitas guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 1(2), 125–132.
- Supianto, Marmoah, S., Poerwanti, J. I. S., Istiyati, S., Mahfud, H., & Sukarno. (2023). A Comparative Study of Education Equity Policy in Remote Areas in Indonesia and Malaysia. *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 19(2), 125–134. <https://doi.org/10.32939/tarbawi.v19i2.2866>
- Susanti, D. C., & Ali, M. (2026). Digitalization of Vocational School Management: Challenges and Opportunities in Strengthening Educational Governance. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1). <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i1.3109>
- Suwandi, I. A. (2026). Dampak zonasi terhadap pendanaan pendidikan: SLR. <https://doi.org/10.65634/j-ppe.v1i3.56>
- Trimiltin, R., & Ahmad, M. (2025). Digitalisasi Tata Kelola Pembiayaan Pendidikan: Peluang dan Tantangan Implementasi E-RKAS. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(3), 888–895. <https://doi.org/10.34125/jmp.v10i3.653>